Iran Kembali Bombardir Yerussalem

Dari Halaman 1

minta seluruh warga memasuki tempat perlindungan dan tetap di sana sampai pemberitahuan selanjutnya.

"Meninggalkan tempat yang aman hanya diizinkan setelah ada informasi lebih lanjut," demikian menurut IDF, dikutip CNNIndonesia.

Dalam rilis resmi, Israel kemudian menyebut Iran meluncurkan rudal salvo. Mereka juga mewantiwanti negara tetangganya.

"Beberapa saat yang lalu, IDF mengidentifikasi rudal yang diluncurkan dari Iran menuju wilayah Negara Israel," tulis militer di Telegram, dikutip AFP. Militer Israel menegaskan sistem pertahanan rudal

sedang bekerja dan berusaha mencegat rudal-rudal

Pada Jumat lalu (13/6), Israel lebih dulu menggempur habis-habisan Iran. Mereka menyerang fasilitas nuklir dan persenjataan hingga permukiman penduduk di Teheran serta beberapa kota lain.

Iran tak tinggal diam. Mereka lalu meluncurkan

100 rudal sebagai serangan balasan. Israel kembali menyerang dan mewanti-wanti jika Iran tak berhenti maka Teheran akan terbakar.

Ancaman Israel tak membuat Iran gentar. Hingga Senin dini hari, saling serang Iran-Israel masih terjadi. Perang itu menyebabkan korban di kedua

Di Iran, 224 orang tewas dan lebih dari 1.200 mengalami luka-luka. Sementara itu, di Israel sepuluh orang tewas dan puluhan mengalami luka-luka.

5 Orang Tewas

Dari Halaman 1

meninggal Israel menjadi 18 orang. Rudal-rudal dari Iran kembali menghujani Israel pada Minggu (15/6) malam hingga Senin (16/6) dini hari. Rudal-rudal itu lantas menghantam beberapa lokasi di Israel tengah dan

Beberapa saat setelah rudal meledak, otoritas Israel mendatangi lokasi kejadian. Yang meninggal dan luka-luka langsung dievakuasi ke rumah sakit terdekat untuk perawatan.

Sementara itu dari Iran disebutkan korban meninggal mencapai 224 orang dan 1.277 lainnya dirawat di rumah sakit sejak rudal jarak jauh ditembakkan kedua belah pihak pada

Israel merupakan pihak yang membuka eskalasi perang terlebih dahulu. Rezim zionis melepaskan sejumlah rudal ke wilayah Iran yang menewaskan 80-an orang, termasuk pimpinan militer.

Sebagai aksi balasan atas langkah agresi Israel, Iran menembakkan rudal jarak jauhnya. Hingga Senin (16/6) kedua negara masih terus melancarkan serangan jarah jauh.(cnni/js)

Serangan Siber ke Israel

Dari Halaman 1

lembaga keuangan, perusahaan telekomunikasi, dan infrastruktur kritis. Serangan itu melonjak drastis dibandingkan periode sebelum

Perusahaan keamanan siber Radware menyatakan data tersebut menunjukkan eskalasi signifikan dalam aktivitas jaringan berbahaya yang menargetkan infrastruktur Israel.

"Peningkatan 700 persen dalam aktivitas berbahaya dalam dua hari terakhir disebabkan oleh operasi balasan siber yang dilakukan oleh aktor negara Iran dan kelompok hacker pro-Iran, termasuk serangan DDoS, upaya infiltrasi yang menargetkan infrastruktur kritis, pencurian data, dan kampanye distribusi malware," kata Ron Meyran, Wakil Presiden Intelijen Ancaman

Siber di Radware, melansir The Jerusalem Post, Minggu (15/6).

Lonjakan serangan siber ini terjadi setelah berita mengenai Israel melancarkan serangan ke Iran keluar ke publik. Redware mengatakan mereka melihat peningkatan aktivitas oleh aktor ancaman yang berafiliasi dengan Iran di saluran Telegram publik dan privat.

"Kelompok siber yang didukung oleh negara Iran diperkirakan akan meningkatkan operasi mereka yang bertujuan untuk mengganggu infrastruktur dan mempengaruhi psikologis," kata perusahaan tersebut.

Situs web pemerintah, lembaga keuangan, perusahaan telekomunikasi, dan infrastruktur kritis termasuk di antara berbagai target serangan tersebut, kata perusahaan tersebut.

Perang Israel vs Iran memasuki hari ketiga

per Senin hari ini. Layanan Gawat Darurat Nasional Israel melaporkan hujanan rudal dari Iran Kembali terjadi sejak Senin dini hari ke sejumlah daerah.

Sebanyak tiga warga Israel dilaporkan tewas imbas serangan Iran ini.

Rudal-rudal Iran itu menghantam wilayah tengah dan pesisir pantai di Israel, termasuk menyasar ke permukiman warga.

MDA melaporkan lusinan warga lainnya mengalami luka-luka serius dan segera dilarikan ke rumah sakit akibat serangan Iran tersebut.

Dengan demikian, total sudah 12 orang tewas akibat serangan ratusan rudal Iran di Israel.

Sementara itu, total 224 orang tewas dan .277 luka-luka di Iran akibat serangan Israel sejak Jumat (13/6) hingga Senin (16/6) waktu setempat.(cnni/js)

Prabowo Akan Keluarkan Peraturan.....

Dari Halaman 1

Aceh dengan Sumatra Utara.

Keempat pulau itu ialah Pulau Mangkir Besar (juga dikenal sebagai Pulau Mangkir Gadang), Pulau Mangkir Kecil (Mangkir Ketek), Pulau Lipan, dan Pulau Panjang.

Kemendagri menetapkan empat pulau itu seba-

gai bagian dari Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Padahal, sebelumnya masuk dalam wilayah administrasi Kabupaten Aceh Singkil.

Menyikapi polemik tersebut, Kemendagri bakal mengkaji ulang status kepemilikan empat

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menyebut kajian ulang itu akan dipimpin Menteri

Dalam Negeri sebagai Ketua Tim Nasional Penamaan Rupa Bumi, pada Selasa (17/6) men-

"Menteri Dalam Negeri sebagai Ketua Tim Nasional Penamaan Rupa Bumi akan melakukan kaji ulang secara menyeluruh pada hari Selasa, tanggal 17 Juni 2025," ujar Bima, Jumat (13/6).

Bendera Bulan Bintang Berkibar

Dari Halaman 1

berbagai perguruan tinggi di Aceh menggelar aksi demonstrasi di halaman Kantor Gubernur

Aceh, Banda Aceh, Senin (16/6). Massa menuntut pengembalian empat pulau yang kini secara administratif tercatat sebagai bagian dari wilayah Sumatera Utara (Sumut).

Dikutip dari RMOLAceh, massa yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Aceh Melawan, mulai memadati kawasan Kantor Gubernur Ach sejak pukul 12.30 WIB. Massa membawa atribut seperti bendera Bulan Bintang dan spanduk bertuliskan referendum.

Aksi ini merupakan bentuk penolakan terhadap Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 yang menetapkan Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek sebagai wilayah administratif Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara.

Dalam orasinya, M. Rizki menyatakan, keputusan pemerintah pusat telah mengkhianati Aceh.

"Republik Indonesia selalu mengingkari janji dari masa Soekarno hingga hari ini. Empat pulau kami dicaplok Sumut dan ditetapkan oleh Tito

Karnavian. Kami minta Tito dicopot dari jabatan Menteri!" serunya lantang.

Selain berorasi, massa juga menyanyikan lagu "Aceh Pusaka Nanggroe" dan "Syahid Aceh" sebagai bentuk simbolik dari perjuangan dan penolakan mereka terhadap keputusan pemerin-

Aparat kepolisian dan petugas Satpol PP dikerahkan untuk mengawal ketat dan mengamankan jalannya aksi. Sejumlah peserta aksi terlihat membawa properti berbentuk senjata mainan dan pelatuk tembakan yang menyerupai alat perang.(rm/js)

FKMPP: Kembalikan ke Aceh!!

Dari Halaman 1

dengan Sumut.

"Mendagri jangan sesuka hatinya saja mengambil keputusan yang ujung-ujungnya membuat Presiden harus turun tangan. Para menteri adalah perpanjangan tangan Presiden, pembantu Presiden dalam mempermudah menjalankan roda pemerintahan dalam mengambil keputusan dan kebijakan, bukan malah memperkeruh suasana dan menjadi polemik di masyarakat, yang pada akhirnya, Presiden juga yang turun langsung, apa guna dan tugasnya menteri?" cecar Bachtiar SH, Ketua Ūmum Forum Komunikasi Masyarakat Peduli Pendidikan (FKMPP), Senim (16/6).

Lebih lanjut ia mengatakan, keputusan yang diambil oleh Mendagri terkait 4 Pulau milik Aceh ke Sumatera Utara merupakan keputusan yang salah dan melanggar perjanjian Aceh -Sumatera Utara.

"Pertama yang dilanggar oleh Mentri Dalam Negeri (Mendagri) adalah penandatanganan kesepahaman antara Gubernur Aceh saat itu, Prof Dr Ibrahim Hasan dan Gubernur Sumatera Utara Raja Inal Siregar pada tahun 1992 soal batas administrasi di wilayah Singkil dan Tapanuli. Acara itu disaksikan Menteri Dalam Negeri Rudini. Dan disepakatilah ke 4 Pulau itu masuk ke wilayah Aceh. Kedua adalah Undangundang Pemerintahan Aceh serta ada juga putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 01.P/ HUM/2013 yang menolak gugatan Sumut dan tercatat juga dalam arsip Nasional Kementrian Dalam Negri, ini kenapa tiba-tiba ada keputusan bahwa Pulau itu di alihkan ke Sumatera Utara, sehingga menjadi polemik diantar masyarakat Aceh dengan Sumatera Utara," ungkap Bachtiar.

Perjanjian Helsinki

Bachtiar juga menyinggung tentang MoU Helsinki. Kesepakatan Helsinki adalah kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang ditandatangani di Helsinki, Finlandia.

Kesepakatan itu, menurutnya, merujuk pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 yang mengatur tentang pembentukan daerah otonom Provinsi Aceh dan perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara.

"Mengenai perbatasan itu, ada di Pasal 114 yang berbunyi Perbatasan Aceh, merujuk pada perbatasan 1 Juli 1956. Jadi, pembicaraan atau kesepakatan Helsinki itu merujuk ke situ,"

Dia menyebutkan undang-undang itu dibuat pada masa Presiden Sukarno. Undang-undang itu dilatarbelakangi oleh keinginan pemerintah untuk menanggapi aspirasi dan tuntutan rakyat Aceh untuk membentuk daerah otonom.

"Intinya adalah dulu Aceh itu bagian dari Sumatera Utara. Banyak insiden, kemudian presiden, karena kemudian ada pemberontakan di sana, DI/TII. Maka Aceh berdiri sendiri sebagai provinsi dengan otonomi khusus," jelas

"Jadi pemberdirian itu dengan kabupaten-kabupaten yang ada, itu intinya. Orang tanya, apa

dasarnya? Undang-undang dasarnya," lanjut dia. Bachtiar mengatakan, secara historis Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang,

dan Pulau Mangkir Ketek memang masuk wilayah Aceh Singkil. Sedangkan perihal geografis, itu perihal biasa.

Ia menuturkan, ada beberapa pulau yang tak hanya mengacu pada letak geografis. Dia mencontohkan salah satunya adalah pulau milik Sulawesi Selatan yang secara geografis lebih dekat dengan Provinsi Nusa Tenggara Timur

"Contohnya di Sulawesi Selatan, ada pulau yang dekat NTT, tapi tetap Sulawesi Selatan, walaupun dekat juga NTT. Itu biasa," tuturnya Memaklumi Gubsu

Ia juga menyayangkan keputusan Gubernur Sumatera Utara yang langsung datang ke Aceh menjumpai Gubernur Aceh terkait 4 Pulau ini.

"Seharusnya, sebelum menjumpain Gubernur Aceh, Gubsu diskusi dulu, rapat dulu dengan jajarannya, dia kan punya Biro Hukum dan Biro-Biro yang lain, terkait masalah seperti ini, tidak harus datang ke Aceh untuk jumpa Gubernur Aceh yang akhirnya menciptakan pergerakan baru dan opini-opini liar di masyarakat dan

meresahkan," sambungnya. Dalam kesempatan ini, Bachtiar juga memaklumi sikap dari Gubsu Bobby Nasution. Sebab, orang nomor satu di Sumatera Utara ini baru saja menjabat dan baru lima tahun aktif di politik dan pemerintahan.

'Kita paham, beliau masih baru dan belum berpengalaman, dan masih banyak harus belajar. Tapi yang jelas, saran saya, kembalikan saja ke 4 Pulau itu ke Aceh, karena memang keempat pulau itu milik Aceh, dan sudah tidak bisa ditawar," tutupnya.(A-10)

Bupati Tapsel

Dari Halaman 1

firmasi menyatakan, pihaknya sudah menugaskan Inspektorat untuk menelusuri dugaan penyimpangan tersebut.

"Kami serius menangani masalah ini. Semua harus sesuai aturan, dan tidak boleh ada yang bermain-main dengan uang negara," tegasnya.

Sementara itu, Direktur PT TSM, Muhammad Yunus Hutasuhut, dalam keterangan singkatnya membantah telah menyalahgunakan dana.

"Semua penggunaan anggaran sudah sesuai kebutuhan operasional dan dapat dipertanggungjawabkan. Kami siap

Dr. Suheri menegaskan, dana yang sudah terlanjur digunakan harus dikembalikan ke kas perusahaan.

'Tidak ada alasan, uang itu harus kembali. Ini soal tanggung jawab moral dan hukum," pungkasnya.(A-10)



Novel Baswedan.....

Dari Halaman 1

Kepala Satgassus, sementara Novel Baswedan menjabat Wakil Kepala Satgassus. Kemudian, anggotanya berasal dari mantan Pegawai KPK yang sebelumnya tergabung dalam Satgassus Pencegahan Korupsi.

"Selama enam bulan ini Satgassus telah berkoordinasi dengan berbagai kementerian seperti Kementerian Keuangan, Kementerian Perhubungan dan Kementerian ESDM," kata anggota Satgassus Optimalisasi Penerimaan Negara, Yudi Purnomo dalam keterangannya, Senin (16/6/2025).

'Termasuk yang terbaru adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan di mana Satgassus turun langsung melihat situasi lapangan di Pelabuhan di Jawa Timur pada tanggal 7-9 Mei 2025 dan Pelabuhan Benoa Bali 11-13 Juni 2025," lanjutnya.

Yudi menerangkan metode atau sistem kerja Satgassus Optimalisasi Penerimaan Negara ini dimulai dengan pengumpulan informasi dan data dari sumber yang relevan. Kemudian, dilanjutkan dengan menganalisis data dan

fakta. Selanjutnya, melakukan koordinasi lintas sektoral hingga menggelar diskusi atau FGD dengan pihak terkait. "(Terakhir) pelaporan dan rekomendasi untuk pengambilan kebijakan," ucap Yudi.

Khusus di sektor perikanan, Satgassus menilai masih ada potensi untuk meningkatkan pendapatan negara. Karenanya, Satgassus pun melakukan sinergitas dan mendampingi para pemangku kepentingan lintas instansi, lembaga dan kementerian baik pusat maupun daerah.

"Satgassus berusaha untuk memetakan masalah dan menawarkan serta mengawal solusi agar PNBP di sektor perikanan meningkat," ucap Yudi.(cnni/js)



Timur Tengah Kian Membara

Dari Halaman 1

rakyat Palestina". Sementara Israel menyebutnya sebagai "serangan teroris" yang mengancam eksistensi negara Yahudi.

Retorika ini bukan hal baru. Iran selama ini menjadikan isu Palestina sebagai alasan moral untuk menghadapi Israel, termasuk mendukung kelompok perlawanan seperti Hizbullah di Lebanon atau Hamas di Gaza. Namun kita tahu, apa pun alasan yang dikemukakan, korban utama tetap rakyat sipil: warga Palestina, warga Israel, dan masyarakat sekitar kawasan.

Yang luput dari banyak pembahasan adalah bagaimana konflik ini makin menyulitkan rakyat Palestina. Setiap kali Iran dan Israel terlibat eskalasi, ruang diplomasi bagi perjuangan Palestina justru makin sempit. Dukungan dunia internasional terpecah; sebagian tersedot untuk bicara soal ancaman perang regional, bukan lagi soal keadilan

Isu Palestina memang menjadi simbol persatuan dunia Islam, sekaligus kartu politik bagi banyak negara. Iran menyebut dirinya sebagai pembela utama Palestina, tetapi di saat bersamaan perjuangan rakyat Palestina di Gaza atau Tepi Barat tetap tak beranjak dari penderitaan. Israel terus memperluas pemukiman ilegal, menekan hakhak dasar warga Palestina, bahkan melakukan blokade ekonomi yang melumpuhkan.

Ironisnya, ketika dunia sibuk mencemaskan perang Iran-Israel, penderitaan Palestina hanya jadi catatan kaki. Serangan udara ke Gaza, pembongkaran rumah warga, penahanan tanpa pengadilan—semua berlangsung di

tengah hiruk-pikuk ancaman perang lebih besar. Kita harus jujur: selama akar konflik utama, yakni penjajahan atas Palestina, tidak diselesaikan, Timur Tengah tak akan damai. Iran dan Israel boleh saja mencapai gencatan senjata sesaat. Tetapi, selama rakyat Palestina tetap dizalimi, benih konflik akan terus tumbuh, siap meledak kapan saja.

Inilah yang harus menjadi fokus dunia internasional: tidak hanya mendesak Iran dan Israel menahan diri, tetapi mendorong solusi adil untuk Palestina. Solusi dua negara, pengakuan kemerdekaan Palestina, atau bentuk kompromi lain, harus kembali dihidupkan dalam agenda diplomasi dunia.

Indonesia, sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar dan pendukung kuat perjuangan Palestina, punya peluang memainkan peran strategis. Bukan hanya menyerukan perdamaian Iran-Israel, tetapi juga mengingatkan dunia: tanpa keadilan bagi Palestina, perdamaian Timur Tengah hanyalah ilusi.

Saatnya dunia berhenti bersikap hipokrit. Jika sungguh ingin perdamaian, mulailah dengan menghapus ketidakadilan terbesar di kawasan: penjajahan atas Palestina. Tanpa itu, konflik Iran-Israel hanya satu bab dari drama panjang yang entah kapan akan berakhir.